BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan uraian dan analisis pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil peneliti dengan dengan teori pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana yang telah dideskripsikan pada analisis data kualitatif. Berikut pembahasan hasil temuan yang cocokkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan peneliti:

A. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan BUMDesma Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Besuki

Pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan menunjukan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BUMDesma Besuki dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Besuki dilakukan melalui pengelolaan program dana bergulir atau simpan pinjam kelompok perempuan serta menentukan kebijakan dalam menjalankan programnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Edi Suharto mengenai aras pemberdayaan, yaitu aras mikro, aras mezzo, dan aras makro, pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dana bergulir atau simpan pinjam kelompok perempuan ini sesuai pada Aras Mezzo yaitu pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensinya. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar masyarakat memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan Aras Makro yaitu pendekatan yang disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.[110]

[110]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.67.

1. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Strategi pengelolaan program simpan pinjam kelompok perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaannya program BUMDesma Besuki ini bisa dikatakan sudah cukup maksimal. Hal ini bisa dilihat bahwa BUMDesma Besuki ini mampu bekerjasama dengan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Besuki, yaitu dengan memberikan pinjaman modal serta melakukan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini juga merupakan wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan peluang yang baik bagi masyarakat yang menganggur dan kekurangan modal untuk menjalakan usahanya menjadi lebih baik.

BUMDesma Besuki ini merupakan salah satu lembaga perekonomian yang pengeloaan programnya dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya kaum perempuan. Selain itu BUMDesma juga membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan di BUMDesma Besuki seperti bekerjasama dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat. BUMDesma juga memberikan pembinaan serta pengembangan usaha dan pelatihan wirausaha. Selain itu BUMDesma juga memberikan dukungan dan motivasi untuk mendorong kemajuan suatu usaha.

Oleh karena itu BUMDesma Besuki bisa dikatakan menganut beberapa prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yang meliputi: a) prinsip *kooperatif* yaitu seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes mampu melakukan kerjasama dengan baik dari pengembangan dan kelangsungan usahanya, b) prinsip *partisipatif* yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia memberikan dukungan yang dapat mendorong kemajuan usaha masyarakat, c) prinsip *transparan* yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dapat diketahui oleh segenap masyarakat dengan mudah dan terbuka, d) prinsip *sustainable* yaitu kegiatan usaha yang dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa prinsip dalam Buku Departemen Pendidikan Nasional yang berjudul "Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa" yang menyatakan bahwa ada 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu: 1). *Koorporatif,* semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik dari pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya, 2). *Partisipatif,* semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela dan memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usahanya, 3). *Emansipatif,* semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, 4). *Transparan,* aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dan harus dapat diketahui dalam

segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, 5). *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif, 6). *Suntainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.[111]

Dalam proses pemberdayaan BUMDesma Besuki melakukan beberapa tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Penyadaran

Pada tahap ini masyarakat diberikan sosialisasi oleh BUMDesma dan pemerintah desa tentang pentingnya memanfaatkan potensi desa secara maksimal. Tahap penyadaran ini juga menggunakan pendekan Mezzo, yaitu pendekan yang dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai intervensinya. Dalam melakukan proses penyadaran ini BUMDesma melakukan secara perlahan dengan BUMDesma mendatangi masyarakat dan diberikannya pencerahan dan motivasi. Selain itu BUMDesma juga memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. Dengan adanya penyadaran yang dilakukan oleh BUMDesma ini masyarakat banyak yang memulai usahanya sesuai dengan potensi masing-masing.

[111]Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hlm.13.

b. Pelatihan

Dalam hal ini masyarakat diajak untuk menggali potensi yang ada diwilayahnya dan masyarakat diberikan pelatihan dalam pengelolaannya sehingga masyarakat membuat usaha tidak asal buat. Dengan demikian BUMDesma membuat pelatihan dengan tema sesuai potensi yang ada di lingkungan tersebut. Pelatihan tersebut dilakukan dan dipraktekkan secara langsung oleh pihak BUMDesma. Setelah adanya pelatihan banyak masyarakat yang berantusias membuat usaha untuk menambah penghasilan dan meningkatkan pedapatannya.

c. Pendampingan

Tujuan pada tahap pendampingan disini adalah kemandirian, selain diberikan penyadaran dan pelatihan masyarakat juga diberikan pendampingan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menjadikan usaha untuk jangka panjang. Dengan adanya pendampingan masyarakat akan dipantau dan didampingi, apabila masyarakat mengalami masalah maka BUMDesma akan bermusyawarah untuk mancari solusinya bersama, Selain itu pendampingan disini juga dilakukan agar masyarakat dapat meningkatkan usaha yang dikelola masyarakat sehingga masyarakat bisa menghasilkan produk yang unggul dan juga mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik hingga masyarakat tersebut bisa mandiri tanpa bergantung kepada orang lain.

d. Evaluasi

Evaluasi yang dimaksud disini yaitu memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan. Dengan adanya evaluasi maka masyarakat dapat memberikan umpan balik dalam usahanya, setelah BUMDesma memberikan penyadaran, pelatihan dan pendampingan mereka juga membuat evaluasi agar program yang dilakukan oleh BUMDesma bisa diketahui kekurangannya dan mereka dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dapat melaksanakan program secara optimal. Evaluasi yang dilakukan disini juga dilakukan oleh pengurus BUMDesma dan pemerintah desa, selain itu evaluasi juga dilakukan dengan masyarakat dimana masyarakat diberikan wewenang untuk menyampaikan pendapat sehingga apa yang menjadi masalah dan kekurangan masyarakat bisa di selesaikan masalahnya. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan usaha sesuai dengan apa yang diharapakan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Proses pemberdayaan ini sesuai dengan teori Aprilia Theresia dalam bukunya yang berjudul "Pembangunan Berbasis Masyarakat" yang menyatakan bahwa dalam proses pemberdayaan dibutuhkan tahapan pemberdayaan sebagai berikut:[112]

[112]Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.236.

a. Penyadaran

Proses penyadaran sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam proses penyadaran juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada proses sosialisasi.

b. Pelatihan

Secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan individu, masyarakat, lembaga dan organisasi. Pelatihan adalah suatu bagaian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

c. Pendampingan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan

masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

d. Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

Bagi kelompok yang ingin mengajukan pinjaman SPP ke BUMDesma Besuki harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak BUMDesma. Berikut ini merupakan gambar dan penjelasan dari mekanisme pengajuan dana pinjaman SPP.

Gambar 5.1
Mekanisme Pengajuan Dana Pinjaman SPP atau Dana Bergulir di BUMDesma Besuki

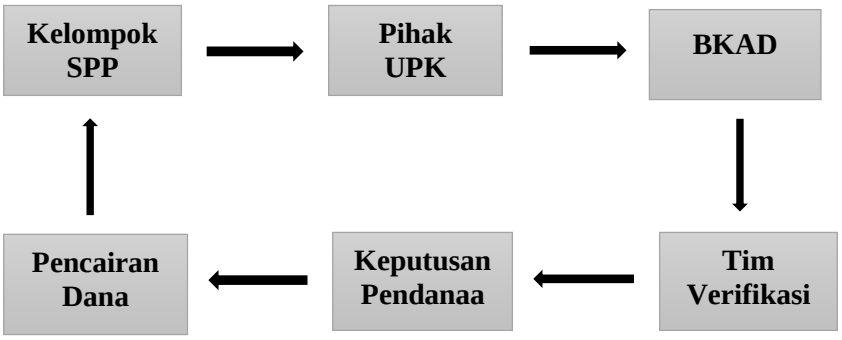

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa mekanisme pengelolan program dana bergulir atau SPP yaitu sebagai berikut: 1). kelompok SPP membuat proposal pinjaman kelompok disertai dengan persyaratan yang dibutuhkan seperti photo copy KTP calon peminjam (suami, istri) dan pernyataan kesediaan tanggung renteng, setelah itu mengajukan proposal kepada pihak UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 2). pengelola UPK menerima dan meneliti (memvalidasi) kebenaran atas proposal beserta lampirannya, misalnya keasliannya, masih berlaku atau tidak dll. Apabila sudah lengkap dan benar berkas-berkas proposal akan di catat pada buku khusus dan kemudian akan dilaporkan kepada BKAD, 3). BKAD akan memberikan intruksi kepada Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi ke lapangan atas proposal tersebut, 4). Kemudian Tim Verifikasi akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan analisa permohonan pinjaman. Setelah Tim Verfikasi selesai melakukan analisa pinjaman, selanjutnya menganalisa dan merekap serta menyusun rekomendasi atas hasil kunjungan lapangan dan analisa pinjaman serta dibuat Berita Acara hasil analisa bersama dan kemudian akan dilaporkan kepada UPK. Kemudian UPK akan melaporkan kepada BKAD, selanjutnya BKAD mengundang tim pendanaan untuk memutuskan pendanaan, 5). Kemudian keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD, 6). Dan apabila pengajuan pinjaman sudah disetuji maka

pihak UPK akan membuat jadwal pencaian dana pinjaman dan menginformasikan kepada pengurus kelompok.

Adapun syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengajukan permohonan pinjaman dana bergulir atau SPP adalah:

a. Warga desa kecamatan Besuki.
b. Perempuan yang sudah mempunyai KTP.
c. Termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).
d. Memiliki usaha yang sudah berjalan maupun belum berjalan.
e. Mempunyai kartu keluarga (KK).
f. Mengajukan permohonan dengan melampirkan proposal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan mekanisme dalam buku *"PTO Penjelasan X: Pengelolaan Dana Bergulir"* yang menyatakan bahwa Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus ditetapkan dalam SPP mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM, hal ini didasari oleh beberapa kondisi diantaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dana UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Adapun tahapan pengelolan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:[113]

[113]PTO Penjelasan X: *Pengelolaan Dana Bergulir*, (Jakarta: 2014), hlm.3.

a. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD (Musyawarah Antar Desa) atau BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa).

b. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat kelompok ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencara penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

c. Verifikasi oleh Tim Verifikasi

Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

d. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

2. Menentukan Kebijakan dalam Menjalankan Kegiatan SPP

Menentukan kebijakan BUMDesma untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan pertemuan atau bimbingan dan Pemberdayaan. Pertemuan wajib dilakukan setiap bulannya untuk melakukan transaksi pembayaran yang didampingi pihak BUMDesma.

Bimbingan yang dilakukan pada kelompok masyarakat penerima program SPP dalam rangka membahas permasalahan yang terjadi pada kelompok yang menjalankan usaha serta mencari solusinya bersama. Sedangkan pemberdayaan dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan baik.

Untuk mengefektifkan berjalannya program serta terealisasikannya proses pemberdayaan yang menjadi tujuan dari program SPP ini, maka pihak program menentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap peminjam:

Gambar 5.2
Mekanisme dalam Menjalankan Kebijakan di BUMDesma Besuki

Sumber: Data primer di olah, 2020.

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pihak UPK mewajibkan untuk setiap kelompok melakukan pertemuan setiap bulannya dengan berkumpulnya anggota pada suatu kelompok untuk melakukan transaksi pembayaran yang didampingi pihak program. Bimbingan yang dilakukan pada kelompok masyarakat penerima program SPP ini dalam bentuk membahas permasalahan yang terjadi pada kelompok yang menjalankan usaha serta mencari solusinya bersama. Hal ini bisa menumbuhkan ide-ide baru dari masyarakat dalam mengelola dana bersama tersebut. Bagi masyarakat yang menjalankan usaha *home industri* akan dibimbing dalam

hal mengelola dan menyalurkan hasil produksi ke pasaran. Kemudian pemberdayaan dalam hal ini yaitu partisipasi masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan baik, dengan ikut melakukan perkumpulan yang dilakukan setiap kelompok guna meningkatkan kamampuan masyarakat untuk mampu berdaya selain itu juga dapat meningkatkan solidaritas antar sesama dan menjadikan masyarakat lebih terdorong untuk aktif serta lebih mandiri.

Pemberdayaan yang dilakukan juga dalam hal melakukan bimbingan atau melakukan pengarahan terhadap usaha masyarakat agar dapat bersaing di pasaran sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Bantuan yang dilakukan BUMDesma dalam melancarkan usaha masyarakat merupakan usaha yang dilakukan pihak BUMDesma dalam memberdayakan msyarakat tersebut.

Dengan adanya program dari BUMDesma Besuki yang membantu memberikan permodalan pinjaman dana bergulir serta pendampingan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan memerlukan tambahan modal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya kaum perempuan. Pinjaman dana bergulir atau simpan pinjam kelompok perempuan ini dianggap berhasil memberdayakan masyarakat Besuki hal ini tergambar pada poin berikut:

1. Adanya lapangan kerja baru.
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Berkembangnya usaha masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program SPP ini sudah berjalan dengan baik dan sedikit banyak sudah dapat membantu mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Besuki.

Kegiatan SPP ini sesuai dengan beberapa konsep yang dikemukakan oleh Oos M. Anwas dalam bukunya yang menyatakan bahwa ada beberapa konsep pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:1) Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri, 2) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan dan budaya masyarakat yang sudah bertahan lama, 3) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan, 4) Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanan, evaluasi termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan, 5) Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut mulai dari, mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan

memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi, 6) Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.[114]

Apabila dilihat dari aras mezzo dan tujuan dana bergulir ini sangat berkaitan, karena pada pinjaman dana bergulir yang menjadi intervensi medianya adalah KSM, dengan meminjam dana bergulir masyarakat dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya sehingga memperoleh pendapatan tambahan yang akhirnya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan anggota, kemudian pada aras makronya dan tujuan dana bergulir ini juga berkaitan, karena pendekatan yang ada pada aras makro ini, pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDesma Besuki yaitu penyaluran dana bergulir yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat anggota SPP.

B. Kendala Dan Solusi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan BUMDesma Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Besuki

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan tujuan secara keseluruhan tentunya banyak kendala yang di hadapi BUMDesma Besuki dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

[114]Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi*, (bandung: Alfabeta, 2013), hlm.60.

bisa dilihat dengan masih adanya kendala yang terjadi baik kendala eksternal maupun internal. Kendala tersebut tentunya sangat menghambat BUMDesma dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Besuki.

Dari hasil wawancara yang terkait dengan kendala yang dihadapi oleh pihak BUMDesma Besuki yang terjadi secara eksternal maupun internal.

1. Kendala Eksternal
   a. Menentukan sikap serta ketertarikan masyarakat dengan adanya BUMDesma Besuki menjadi kendala eksternal.

      Ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui mengenai adanya BUMDesma Besuki, masyarakat cenderung tidak mau tau mengenai program dan tujuan dari BUMDesma Besuki. Selain itu banyak masyarakat yang menyepelekan dan tidak menganngap keberadaan BUMDesma dan takut untuk bergabung atau ikut bekerjasama dengan BUMDesma, karena masyarakat takut jika nantinya BUMDesma hanya akan memanfaatkan masyarakat untuk kemajuan dan keberhasilan dari pihak BUMDesma itu sendiri.

   b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit usaha yang ada di BUMDesma Besuki menjadi kendala eksternal.

      BUMDesma Besuki mengelola unit usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya unit usaha yang dijalankan BUMDesma Besuki ini maka masyarakat Besuki yang membutuhkan modal usaha bisa meminjam ke unit usaha pengelolaan dana bergulir atau biasa disebut dengan SPP. Selain itu dengan adanya unit usaha di

BUMDesma mampu membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Besuki yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.

c. Kendala kredit macet yang terjadi pada unit usaha simpan pinjam kelompok perempuan.

Ada tiga macam seperti tunggakan macet, tunggakan yang masih bisa dikendalikan dan tunggakan yang benar-benar parah. Tunggakkan ini dikarenakan seperti adanya usaha yang tidak berkembang dengan baik dan juga adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh anggota atau ketua kelompok SPP yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini sesuai dengan jurnal penelitian dari Edy Yusuf Agung Gunanto, dkk. yang berjudul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” bahwa tingkat pengetahuan dan wawancara masyarakat yang rendah dan pola pikir masyarakat yang belum terbuka sehingga kesulitan mengubah mindset seseorang untuk memulai kelompok usaha. Banyak potensi desa yang seharusnya bisa dikelola dengan baik, akan tetapi hanya dibiarkan karena keengganan masyarakat untuk memulai untuk menjalankan usaha. Pihak BUMDes juga kesulitan dalam menghadapi peminjam yang menunggak pengembalian pinjaman. Masyarakat pedesaan mengganggap bahwa dana yang dipinjam mereka merupakan dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah, sehingga tidak sedikit dana pinjaman BUMDes yang tidak dikembalikan. Ada beberapa desa

di Kabupaten Jepara sebesar 95% dana BUMDes hilang untuk simpan pinjam.[115]

Selain itu kendala eskternal BUMDesma Besuki ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismawati yang berjudul ”Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasai dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal” dimana kendala atau faktor penghambat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Perwitasari. Faktor penghambat dan pendukung yang ada pada kegiatan BUMDes Perwitasari yaitu kendala internal dan eksternal pada pelaksanaan kegiatan BUMDes. Kegiatan akan berhasil jika kepercayaan masyarakat dapat dibangun dalam ranah pembangunan yang lebih baik. Apabila masyaraat sudah percaya maka akan mau untuk mengikuti proses kegiatan tersebut.[116]

2. Kendala Internal

   a. Kurangnya peralatan kerja termasuk kendala internal dalam BUMDesma Besuki.

      Kurangnya peralatan kerja seperti terbatasnya komputer, mesin print, dan sempitnya ruang kerja. Hal tersebut membuat kariyawan tidak nyaman dalam mengerjakan tugas-tugasnya di kantor BUMDesma

---

[115]Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol.13, No. 1 Maret 2016, hlm.76.

[116]Rismawati, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kebupaten Kendal*, (Semarang: Skripsi tidak Diterbitkan, 2018).

Besuki. Selain itu kariyawan juga harus bergantian dalam menggunakan fasilitas kerja dan juga merasakan pengapnya kantor yang terlalu sempit.

b. Kemudian terbatasnya tenaga kerja juga menjadi kendala internal dalam BUMDesma Besuki.

Hal ini dilakukan BUMDesma agar tidak terjadi penmbengkakan keuangan di BUMDesma. Karena dengan menambah kariyawan baru maka akan semakin banyak dana yang akan dikeluarkan oleh pihak BUMDesma. Hal ini bisa menghambat kelangsungan jalannya BUMDesma kedepannya. Maka dari itu hanya ada tiga orang pegawai saja yang bekerja penuh dan mengatasi satu kecamatan di kantor BUMDesma.

Hal ini sesuai dengan Jurnal penelitian dari Muhammad Bahrul Rizki yang berjudul "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur " yaitu dalam pengembangan usaha kebun singkong gajah belum tersedia mesin untuk mengeringkan tepung. Sehingga untuk proses pengeringan masih mengandalkan panas matahari. Dan hal tersebut dapat menghambat proses produksi karena kondisi alam yang tidak menentu. Oleh karena itu pekerja sering kerepotan saat hujan turun secara tiba-tiba.[117]

[117]Muhammad Bahrul Rizki, *Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*, Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Vol. 6, Nomor. 4 2018, hlm. 56-57.

Selain itu kendala ini juga sesuai dengan jurnal dari Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. yang berjudul "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" yaitu terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola dan mengembangkan BUMDes. Masih banyak pengurus BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, Sehingga pengurus lebih fokus ke pekerjaan utamanya dari pada fokus pada pekerjaan di kantor BUMDes.[118]

Kemudian dari hasil penelitian yang diperoleh, dalam penyelesaian kendala yang dihadapi BUMDesma Besuki yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDesma telah menyusun strategi dalam mengatasi kendala tersebut.

1. Solusi Dari Kendala Eksternal
   a. Solusi dalam mengatasi Sikap dan ketertarikan masyarakat terhadap program BUMDesma

      Solusi yang dilakukan yaitu dengan meyakinkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya BUMDesma Besuki ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Besuki. Dengan memberikan arahan serta motivasi mengenai unit usaha yang dijalankan BUMDesma, maka masyarakat akan lebih bisa dalam menentukan

[118]Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...*, hlm.75.

usaha yang akan dikembangkan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Besuki.

b. Solusi dalam mengatasi kendala kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit usaha yang ada di BUMDesma

Solusinya dengan memberikan pendampingan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, karena dengan cara melakukan pendampingan pelatihan maka akan terlihat potensi-potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat Besuki. Kemudian akan dilakukan pendampingan pembinaan guna untuk membina masyarakat agar usaha yang dikelola masyarakat akan lebih maju dan berkembang. Hal ini bisa dijadikan daya tarik untuk masyarakat agar lebih tertarik dan mau bekerja sama dengan BUMDesma Besuki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

c. Kemudian Solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi pada unit usaha SPP di BUMDesma

Solusi yang diambil BUMDesma yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang membuat dana atau pinjaman modal tersebut mengalami penunggakkan atau macet. Kemudian setelah BUMDesma mengetahui masalahnya selanjutnya akan mengkonfirmasi kepada pengurus kelompok untuk penanganan masalah tunggakan, mensosialisasikan kepada kelompok terkait jatuh tempo, tim kecamatan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa, di bentuk Tim Penanganan Masalah untuk pencapaian progres yang lebih baik, melakukan penagihan

bersama Tim Penanganan Masalah, selanjutnya menindaklanjuti progres penyelesaian tunggakan jika tidak bisa selesai akan dilakukan progres yang lebih lanjut. Hal ini dilakukan agar nantinya usaha tersebut tetap bisa berjalan dan berkembang menjadi lebih besar lagi dan peminjam modal nantinya bisa mengembalikan pinjaman modal yang dipinjamnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan jurnal penelitian dari Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. yang berjudul "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" yaitu bahwa dalam mengatasi kendala mengenai tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat yang rendah serta pola masyarakat yang belum terbuka tentang adanya kelompok usaha di BUMDes Mandiri. Dengan memberikan pendampingan pelatihan dan pembinaan tentang usaha serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa adanya BUMDes mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa mandiri. Dan ini sama dengan solusi yang dilakukan BUMDesma Besuki.

Kemudian solusi dalam mengatasi kendala pada Unit usaha simpan pinjam pada penelitian terdahulu di jurnal Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. Terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam menangani kendala unit simpan pinjam di BUMDes Mandiri dengan mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti bank ataupun perusahaan. Karena apabila BUMDes Mandiri tidak meminjam modal dari pihak luar, maka perkembangan BUMDes akan lambat dan bahkan

tidak aktif kembali karena tidak memiliki dana untuk menjalankan usahanya dengan baik.[119] Sedangkan dalam penelitian ini solusi yang dilakukan BUMDesma Besuki yaitu dengan melakukan identifikasi masalah mengenai apa penyebab terjadinya kredit macet, dan apabila tunggakkan itu parah maka akan diberikan pinjaman dana untuk pengembangan usaha akan tetapi dengan di berikan batas waktu pengembalian maksimal 2 tahun.

Hal ini sesuai dengan teori Isbandi Rumikto bahwa dalam model pemecahan masalah dalam usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: a). Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan, b). Jasa pelayanan (*service*) berupa bimbingan dan penyuluhan, c). Kesempatan-kesempatan seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan semacamnya.[120]

2. Solusi Dari Kendala Internal

   a. Solusi dalam mengatasi kendala kurangnya peralatan kerja

      Untuk mengatasi kendala kurangnya peralatan kerja BUMDesma Besuki nantinya akan membeli peralatan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan untuk nantinya BUMDesma akan

---

[119]Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...*, hlm.76-77.

[120]Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: FISIP UI Pres), hlm.5-6.

membangun kantor sendiri agar tidak mengontrak lagi dan kariyawan yang bekerja di kantor akan lebih merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan mereka.

b. Kemudian Solusi dalam mengatasi kendala terbatasnya tenaga kerja

Solusi untuk mengatasi kendala mengenai terbatasnya tenaga kerja yaitu dengan menambah kariyawan yang profesional akan tetapi dengan cara hitung-hitungan terlebih dahulu, dan harus memastikan jika menambah kariyawan BUMDesma Besuki tidak akan terhambat dalam sistem operasionalnya. Sehingga untuk kedepannya BUMDesma Besuki tetap akan berkembang. Oleh karena itu, untuk saat ini BUMDesma Besuki lebih memilih tiga kariyawan saja yang bekerja penuh di Kantor dan mengatasi satu Kecamatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan jurnal penelitian Muhammad Bahrul Rizki yang berjudul “Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur” yaitu dalam mengatasi kendala belum tersedianya mesin pengering tepung rencana pihak pemerintah desa dan BUMDes akan mencari solusi bagi yaitu dengan membeli mesin pengering. Sehingga dengan adanya mesin tersebut kariyawan tidak akan kerepotan saat

hujan turun secara tiba-tiba dan dapat meminimalisir waktu untuk melakukan kegiatan lainnya.[121]

Kemudian solusi dari terbatasnya tenaga kerja penelitian ini sesuai dengan jurnal Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. yang berjudul "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" yaitu bahwa ada kesamaan dalam mengatasi kendala mengenai keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes. Cara mengatasi kendala tersebut dengan cara mencari pengurus yang profesional dalam kegiatan BUMDes. Pengurus yang dibutuhkan yaitu orang-orang yang berkompete dan mempunyai wawasan yang luas untuk memberikan motivasi pada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.[122]

---

[121]Muhammad Bahrul Rizki, *Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong...*, hlm. 56-57.

[122]Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...*, hlm.75.

Tabel 5.1
Kendala Dan Solusi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Besuki

Kendala	Solusi
Kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap program BUMDesma Besuki	Meyakinkan masyarakat dengan memberikan Sosialisasi terkait program yang dijalankan BUMDesma.
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit usaha yang ada di BUMDesma Besuki	- Memberikan pendampingan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, karena dengan cara melakukan pendampingan pelatihan maka akan terlihat potensi-potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat Besuki. - Kemudian akan dilakukan pendampingan pembinaan untuk membina masyarakat agar usaha yang dikelola masyarakat akan lebih maju dan berkembang.
Adanya tunggakan dana SPP	- Mengkonfirmasi kepada pengurus kelompok untuk penanganan masalah tunggakan, - Mensosialisasikan kepada kelompok terkait jatuh tempo, - Tim kecamatan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa, - Di bentuk Tim Penanganan Masalah untuk pencapaian progres yang lebih baik, - Melakukan penagihan bersama Tim Penanganan Masalah, - Selanjutnya menindaklanjuti progres penyelesaian tunggakan jika tidak bisa selesai akan dilakukan progres yang lebih lanjut.
Kurangnya peralatan kerja	BUMDesma Besuki nantinya akan membeli peralatan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan.
Terbatasnya tenaga kerja	Menambah kariyawan baru yang profesional akan tetapi dengan cara hitung-hitungan terlebih dahulu, dan harus memastikan jika menambah kariyawan BUMDesma Besuki tidak akan terhambat dalam sistem operasionalnya.

Sumber: Data primer diolah, 2020